

OPTIMALISASI DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA WISATA

Nasikun

Destha T. Raharjana

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
Universitas Gadjah Mada

Abstract

By welcoming the era of the globalization, the national tourism should face the big threats requiring the increase of the quality and the quantity of the resources and the infrastructure support. Both or in the center of the government or in the region government. On the other side, according to the application of the regional autonomic, the Regional Tourism service would be sought so that he can implement its optimum functions the measure in order to increase its regional revenue. This study focused on the take over from the national government affairs to the regional government, based on these following variables. (1) the preparation of the organization of the administration of the tourism, (2) the preparation of legal organization (3) the level of the productivity or the development of tourism, and (4) the delivery of tourism affaires.

Keywords : *globalization, regional autonomic, the Office of Regional Tourism*

Pendahuluan

Di hadapan kehadiran kecenderungan baru perkembangan pariwisata internasional yang akan menemukan momentumnya pada era globalisasi mendatang, negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia pada umumnya menghadapi kelemahan yang sangat mendasar di dalam kemampuannya untuk menjawab tuntutan baru perkembangan pariwisata. Meminjam ungkapan Reich (1991) akan muncul tuntutan akan "high

value production of unique commodities" menggantikan "high volume of standard commodities", munculnya profil wisatawan baru yang bersifat "alosentris" menggantikan profil wisatawan yang "psikografis", dan juga nadinya tuntutan manajemen yang lebih "humanizing" menggantikan manajemen industri pariwisata yang "dehumanizing" serta hadirnya tuntutan teknologi pariwisata yang "interactive" menggantikan teknologi yang "konvensional".

Kesemuanya ini mengisyaratkan

pentingnya pemberdayaan sistem pariwisata nasional melalui berbagai upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan memenuhi semua itu dihadapan persaingan global yang semakin keras. Dalam konteks inilah penguatan daerah tingkat II di dalam optimalisasi pendayagunaan dan pengembangan sumber daya wisata yang dimiliki menjadi sangat mendesak.

Permasalahan

Dihadapan latar belakang di atas, masalah yang diajukan dalam studi ini adalah "bagaimanakah suatu tolok ukur atau kriteria penentuan kesiapan daerah tingkat II untuk menerima dan mengelola otonomi kepariwisataan yang harus dirumuskan dan juga perlu pengingtrasian sistem informasi untuk mendukung pengembangan kepariwisataan secara keseluruhan.

Tujuan penelitian

Studi ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Menghasilkan gambaran tingkat kesiapan pemerintah daerah tingkat II untuk menerima penyerahan urusan kepariwisataan dari pemerintah pusat.
2. Menghasilkan rumusan rancangan

program peningkatan kemampuan daerah tingkat-II untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor andalan.

Tinjauan pustaka

Beberapa argumen yang melatarbelakangi perlunya pendayagunaan dan pengembangan sumber daya wisata daerah tingkat II; pertama, bersumber dari adanya kekuatan besar yang menuntut perubahan dalam paradigma pembangunan dunia ketiga dengan menempatkan isu kemiskinan, demokratisasi dan pelestarian lingkungan dalam konteks pembangunan yang hendak dilaksanakan. Model pembangunan seperti dapat dicapai bila mampu dengan baik menanggapi kepentingan-kepentingan para pelaku ekonomi skala kecil dan menengah di negara III serta dengan sistematis memanfaatkan potensi produktif mereka. Perubahan paradigma ini menuntut pula perubahan dalam iklim politik negara-negara dunia ketiga guna menyebut redefinisi peran negara yang menuntut perlunya profesionalisme pemerintah, desentralisasi atau delegasi kekuasaan pemerintah pusat ke pemerintah

daerah dan pertumbuhan ekonomi yang dibangun di atas pengendalian aset dan produktivitas ekonomi di tangan para pelaku ekonomi berskala kecil dan menengah melalui peningkatan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan-keputusan nasional.

Kedua, munculnya kecenderungan baru perkembangan pariwisata internasional yang semakin membuka ruang bagi terjadinya dialog antara kekuatan-kekuatan global dan kekuatan-kekuatan lokal. Perubahan-perubahan mendasar di dalam karakter konsumen, produsen, dan manajemen industri pariwisata internasional serta dalam hal teknologi pariwisata yang mendukungnya (Poon, 1995).

Dinamika dua kecenderungan baru tersebut kini tengah bekerja dan memberikan tempat kepada kekuatan lokal dengan semakin pentingnya sumber daya wisata lokal di hadapan kekuatan-kekuatan internasional. Dalam konteks itulah upaya untuk melakukan optimalisasi pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya wisata daerah tingkat II harus dipahami dan ditempatkan. Optimalisasi sumberdaya wisata yang dimaksud meliputi; (1) berkaitan dengan demand, berupa peningkatan saham (share) dan potensi wisatawan

mancanegara di setiap daerah tingkat II, (2) dalam hubungan dengan supply-side, meliputi demand >< supply pengembangan ODTW yang memiliki kesesuaian dengan tuntutan pasar, (3) perubahan dalam hal manajemen kepariwisataan dan (4) optimalisasi dalam penguasaan jenis-jenis teknologi informasi yang kompetitif dengan tuntutan persaingan di era globalisasi.

Metodologi

1. Pengumpulan data

Secara umum metode yang diterapkan dalam pelaksanaan studi ini adalah melalui dua pendekatan; (1) kajian pustaka berupa penelusuran data sekunder yang diperoleh dari beberapa referensi dari pemerintah atau pelaku industri, (2) pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan penyebaran kuesioner untuk mengetahui tingkat perkembangan objektif pariwisata di masing-masing lokasi. Di samping metode ini, pengumpulan data juga ditempuh dengan cara diskusi kelompok terarah (FGD) yang dilakukan di 3 lokasi terpilih dengan melibatkan *stake holders* pariwisata. Selain dua cara tersebut digunakan

pula wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dilakukan dengan nara sumber yang memiliki kompetensi di bidang kepariwisataan daerah.

2. Jenis data yang diperlukan

Jenis data yang digunakan meliputi data tentang; (1) kesiapan kelembagaan administrasi pariwisata; (2) kesiapan kelembagaan hukum; (3) tingkat produktivitas atau perkembangan pariwisata; (4) penyerahan urusan kepariwisataan. Asumsi yang mendasari pemilihan keempat variabel tersebut adalah (a) tingkat produktivitas industri pariwisata dipengaruhi oleh tingkat diferensiasi kelembagaan industri kelembagaan hukum dan (b) penyerahan urusan pariwisata dari pemerintah pusat ke daerah ditentukan berdasarkan kesiapan kelembagaan administrasi pariwisata, kelembagaan hukum dan tingkat produktivitas atau perkembangan industri pariwisata

daerah tingkat II.

3. Metode Analisis

Data yang terkumpul akan dianalisis melalui analisis naratif-deksriptif dan statistik-kuantitatif terutama melalui teknik penyusunan skala Guttman untuk membandingkan kesiapan daerah tingkat II yang dijadikan sampel dari studi ini. Teknik penyusunan skala Guttman merupakan suatu jenis teknik analisis penyusunan skala yang disebut "*scalogram analysis*" atau "*scale analysis*" (Philips, 1971: 225-233).

4. Lokasi Studi

Pemilihan lokasi studi dilakukan untuk mewakili tiga kategori daerah tingkat II berdasarkan kriteria tingkat perkembangan pariwisata. Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Badung-Bali mewakili daerah pariwisata yang berkembang,

Kabupaten Sleman-DIY mewakili daerah sedang berkembang dan Kabupaten Ciamis-Jawa Barat mewakili daerah wisata belum berkembang.

Hasil dan Pembahasan

Kesiapan Kelembagaan Hukum

Variabel terpenting dalam mengukur kesiapan daerah adalah dari aspek kelembagaan hukum, mencakup di dalamnya adalah perangkat-perangkat atau produk hukum yang melandasi bagi pelaksanaan desentralisasi. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung lebih besar dibandingkan dengan ketiga daerah lainnya. Kendatipun belum secara keseluruhan diperoleh Perda Tk II yang mengatur pengelolaan peran pariwisata.

Hal ini juga terlihat dari respon Kabupaten Sleman yang telah



menghasilkan 12 Perda yang di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan urusan kepariwisataan yang dilimpahkan kepada daerah. Kabupaten Sleman memiliki tingkat kelengkapan yang paling tinggi di antara ketiga daerah sampling lainnya.

Berbeda dengan dua wilayah lainnya, Kabupaten Ciamis tampak belum siap perangkat hukumnya yang mengatur pelimpahan wewenang dalam pengelolaan pariwisata.

2. Keselapan Kelembagaan Administrasi

Pembentukan Dinas Pariwisata Dati II Badung terkait dengan penyerahan sebagian urusan kepariwisataan berdasarkan Perda Tk II No.14 tahun 1989. Pada waktu itu diserahkan sebanyak 10 urusan, sedangkan dalam rangka percontohan penyerahan berbagai urusan pemerintah kepada 26 daerah Tk II, pemerintah daerah telah meresponnya

dengan mengeluarkan Perda No.15/1995 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Diparda Tk II Badung.

Untuk Kabupaten Sleman sebagai konsekuensi adanya penyerahan urusan bidang kepariwisataan dibentuklah Dinas Pariwisata melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1995. Untuk uraian masing-masing unsur organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata Dati II Sleman diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No. 303/Kep.KDH/1995.

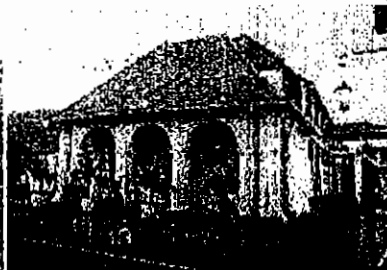
Sementara untuk Kabupaten Ciamis pembentukan kantor Dinas Pariwisata Tk II telah dibentuk tahun 1985. Bila keberadaan instansi daerah dijadikan sebagai indikator dalam menilai kemampuan otonomi dalam penyelenggaraan urusan kepariwisataan, kabupaten Ciamis mungkin termasuk yang baru berkembang.

3. Produktivitas Industri Pariwisata

Kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Kabupaten Badung setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Tahun 1997 kunjungan wisatawan berjumlah 2,75 juta orang dengan tingkat hunian hotel bintang berkisar 65-70% dan 60% untuk hotel non bintang. Rata-rata lama tinggal wisatawan asing tinggal di Badung 10-12 hari dengan pengeluaran sebesar \$165,92 tahun 1997.

Untuk perkembangan pariwisata Propinsi DIY menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan wisatawan asing dari 1991-1997 hanya 5,18% lebih kecil dibandingkan dengan wisatawan domestik sebesar 6,16%.

Perkembangan jumlah wisatawan tahun 1997 di Kabupaten Ciamis menunjuk bahwa jumlah wisatawan asing yang menginap sebanyak 41.855 orang dan wisatawan domestik sebanyak 232.184 orang. Rata-rata



pertumbuhan jumlah wisatawan asing yang menginap selama tahun 1991-1997 meningkat sebesar 24,17%, sedangkan wisatawan domestik meningkat menjadi 6,59%.

4. Penyerahan Urusan Kepariwisata

Dalam hal penyerahan urusan kepariwisataan, pemerintah daerah Propinsi Bali telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang pelimpahan dan penyerahan urusan kepariwisataan, termasuk didalamnya penyerahan kepada Pemda Tk II Kabupaten Badung. Secara keseluruhan terdapat 14 urusan di bidang kepariwisataan yang telah diserahkan kepada Pemda Tk II Badung.

Untuk Kabupaten Sleman telah menerima sebanyak 12 urusan dalam bidang kepariwisataan dan telah melaksanakan 7 urusan sedangkan 5 urusan lainnya belum dapat dilaksanakan, meliputi ; perkemahan wisata, penginapan remaja, usaha kawasan pariwisata, mandala wisata dan usahabar.

Sementara untuk penyerahan urusan kepariwisataan di Kabupaten Ciamis menurut Perda No. 5 Tahun 1983, telah menerima urusan bidang

pariwisata, yakni usaha hotel dengan tenda bunga melati, usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata, usaha rumah makan, usaha perkemahan wisata dan usaha rekreasi dan hiburan umum.

Kesimpulan

Terdapat konsistensi hubungan antara kesiapan kelembagaan administrasi kepariwisataan, kesiapan kelembagaan hukum, tingkat produktivitas industri pariwisata dan penyerahan urusan kepariwisataan di masing-masing lokasi. Dari hasil studi disimpulkan bahwa Kabupaten Badung menduduki peringkat pertama, Kabupaten Sleman di tempat kedua dan terakhir Kabupaten Ciamis.

Di samping keempat variabel tersebut, perlu pula memperhatikan aksesibilitas sebagai prasarana signifikan untuk pendukung proses mobilitas dan juga kemampuan masyarakat yang mencakup tingkat pendidikan dan karakteristik budaya masyarakat setempat.

Pustaka

Puspar UGM
1998 *Optimalisasi Pendayagunaan dan Pengembangan Sumber-Deya Wisata DT II dalam Mendukung Pariwisata Nasional. Laporan Akhir. Yogyakarta : Puspar UGM-Deparsenitbud.*

Philips, Bernard
1997, *Social Research Strategy and a Teclics. Momilono, Company, New York and London.*

Poon, Auliana
1993 *Tourism, Technology, and Competitive Strategies, CAB International, Wellngford.*

Reich, Robert B
1993 *The Work of Nations, preparing ourselves for 21st-Century Capitalism, Alfred A. New York: Knof Inc.*

* Ucapan terima kasih disampaikan penulis kepada Ari Sujlto S.Sos yang telah berperan serta dalam penelitian ini.